

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
I	Informasi Persandian/ Kemananan Informasi				
1	<p>Dokumen persandian, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radiogram/Kawat bersandi, berita sandi; - Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian; - Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan, peralatan, dan kegiatan persandian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 	1 Tahun	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran
2	Dokumen Internet Protokol/ IP address private, bandwidth management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management database	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Pasal 30 s/d pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	1 Tahun	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
3	Daftar Internet Protocol (IP)	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
4	Laporan IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
5	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet Pemkab Temanggung	Pasal 25 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
6	Buku Assesment infrastruktur jaringan internet	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
7	Daftar User dan Password perangkat jaringan	Pasal 25, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
8	Data aplikasi sebagai berikut: a OS Server yg digunakan b Bahasa Pemograman c Database d User dan password e Manual pengembangan web f Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan g Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan	Pasal 25, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
II Informasi Pemerintahan					
9	Data-data yang berkaitan dengan rahasia Pemerintah/ Negara	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.3 Th.2002 tentang Pertahanan Negara - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor. 16 tahun 2011 tentang KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah) 	selama masih berlaku	Membahayakan Pemerintahan/ Negara	Melindungi Data Pemerintah/Negara
III Informasi Hukum					
10	Daftar Anggota/orang yang terlibat Organisasi Terlarang	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. 	1 Tahun	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
IV Informasi Kesekretariatan					
11	Biodata Anggota Perpustakaan yang memuat Nama, NIK, Alamat, Nomor Telepon, Alamat Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 2 huruf c 	1 Tahun	Penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggungjawab dalam pemanfaatan layanan Dinpusip	Perlindungan data pribadi
V Informasi Keuangan dan Asset					
12	<p>Dokumen Barang Milik Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara(BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan) - Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN - Data detail BMN (buku barang KIB, daftar barang) 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	1 Tahun	Menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN	Memastikan keamanan pemanfaatan dan pemindahtanganan sarana prasarana BMN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
13	<p>Dokumen Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan pengaduan individu / masyarakat - Laporan hasil audit pemeriksaan reguler - Laporan hasil audit pemeriksaan khusus - Laporan hasil audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu - Review keuangan yang belum diaudit - Laporan hasil pengawasan internal - Dokumen Rekaman Medis 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia internal instansi - Menghambat proses audit 	<ul style="list-style-type: none"> - Identitas pengaduan terjaga, rahasia dokumen keuangan aman validitas audit
14	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ayat 3.b tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	Sampai dengan penyerahan ke dua/ Berakhirnya masa pemeliharaan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
15	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ayat 3.b tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 	1 Tahun	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 			
16	Daftar rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang;	Pasal 17b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
17	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengkah	Pasal 17b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
VI Informasi Inspektorat					
18	Dokumen Pemeriksaan, Reviu, dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j ; - Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26 - Standard Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit 	1 Tahun	Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara - Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
19	Dokumen Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j ; - Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26 	1 Tahun	Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
		- Standard AAIPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit			
VII Informasi Kepegawaian					
20	Proses Pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan Perceraian (BKPSDM)	Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan.	Sampai diterbitkan Keputusan Bupati (dapat diakses secara terbatas untuk kepentingan tertentu)	Mengungkap data pribadi/PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia
21	- Identitas PNS yg melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman: - Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS; - Proses pemberhentian PNS; - Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; (BKPSDM)	Pasal 17 huruf h UU 14/2008	Sampai diterbitkan Keputusan Bupati (dapat diakses secara terbatas untuk kepentingan tertentu)	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia
22	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, dan notulansi hasil rapat Baperjakat (BKPSDM)	- Pasal 17 huruf I UU 14/2008 - UU No. 43/99 ttg Kepegawaian	1 Tahun	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
23	Usulan Formasi CASN	UU 5/2014 tentang ASN	Sampai dengan penyerahan surat keputusan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah Kolusi

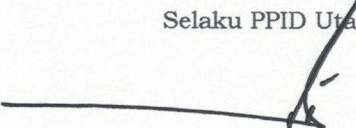
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
22	Data yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan PPNS	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791) pasal 256 ayat (7) mengamanatkan pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) dengan Peraturan Pemerintah	Selama masih dalam penyelidikan dan penyidikan	Penyelidikan akan gagal karena data/lokus kejadian dapat dirubah atau dihilangkan	Terselesainya masalah yang sedang terjadi sesuai dengan Standara Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP
VIII Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
24	Data client jaringan Dinas Dukcapil	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah isi/bentuk dari jaringan yang ada	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
25	Topologi dan konfigurasi jaringan LAN Dinas Dukcapil	Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/ mengubah isi/ bentuk dari topologi dan jaringan LAN yang ada	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
26	Daftar IP	Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah IP jaringan yang ada	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
27	Daftar User dan Pasword perangkat jaringan LAN Dinas Dukcapil	Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah isi/bentuk dari jaringan yang ada	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
28	Data Aplikasi yang meliputi Bahasa Pemrograman, Database, Source Code	Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah isi/bentuk dari aplikasi yang ada	Melindungi Aplikasi dan data yang ada dari kerusakan/penggandaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
29	Data Aplikasi yang diakses oleh instansi Lain	Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah isi/bentuk dari aplikasi yang ada	Melindungi Aplikasi dan data yang ada dari kerusakan/penggandaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
30	Data penduduk by name by address	Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	1 Tahun	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
31	User dan Pasword untuk Login SIAK dan KTP Elektronik	Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	1 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah biodata seseorang	melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
X	Informasi Kesehatan				
32	DOKUMEN TERKAIT KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN - Dokumen perencanaan dan pembekalan farmasi - Dokumen resep yang sudah dilayani	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	1 Tahun	Mengungkap riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
XI	Informasi Sosial, Tenaga Kerja, dan UMKM				
33	Data pribadi orang asing dan tenaga kerja asing	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	1 Tahun	Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia
34	Data pribadi tenaga kerja	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	1 Tahun	Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia
35	Hasil mediasi (Perjanjian bersama/ Putusan Bersama)	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1 Tahun	Tidak terjaganya kebijakan perusahaan atau data perusahaan	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
36	Struktur dan Skala Upah (SUSU)	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah	1 Tahun	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
37	Simfoni (Data Kekerasan Perempuan & Anak)	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i	1 Tahun	Ranah Privasi Korban & Proses Hukum	Pendataan/pendampingan kasus kekerasan perempuan & anak beserta solusi & bantuan hukum
XII	Lingkungan Hidup				
38	Proses penyelidikan & penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda PPNS & rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Tahun	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
39	Proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Tahun	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
XIII	Informasi HAKI, Penelitian, dan Perijinan				
40	Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data keuangan, aset dan design bangunan	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Tahun	Dapat mengungkap dokumen rahasia perusahaan/perorangan	Melindungi dokumen perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia

Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku PPID Utama


Sigit Aryono, SH

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Selaku Atasan PPID Utama


Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM